



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

(RLPPD)

Kota Bitung

TAHUN 2021





RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(R L P P D)

KOTA BITUNG TAHUN 2021

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi/isi dari R-LPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bitung Tahun 2022 yang bersumber dari Laporan tiap Perangkat Daerah yang mencakup capaian kinerja Makro capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah Pusat pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

Berikut tabel Indikator Kinerja Makro kota bitung tahun 2021 perbandingan dengan tahun 2020.

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74.1	74.2	0.13 %
2	Angka Kemiskinan	6.41	6.43	0,31 %
3	Angka Pengangguran	10,23	9,96	-2.63 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	11325095.84	11846005.8	4,6%
5	Pendapatan Per-Kapita	76091584.11	82216200.61	8.04 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,35	0,324	-7.4 %

2.RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal, Pelayanan dasar meliputi :

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- Sosial

Berikut ringkasan capaian Pelayanan Dasar di Kota Bitung tahun 2021 :

NO		NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	5201	75,30
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	6907	

		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	20.893	93,85
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	22.261	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	11044	88,84
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	12432	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1919	151,70
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	1265	
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	447	1,97
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	226614	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	12	100
				Jumlah RS di kabupaten/kota	12	

7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4995	100
		Jumlah ibu hamil di kota	4995	
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	4880	100
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	4880	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4500	100
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	4500	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	8115	59,01
		Jumlah balita di kota	13752	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	13672	39,41
		Jumlah anak pendidikan dasar di kota	34689	
12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	18025	11,40
		Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	158097	

13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19789	97
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	20402	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	23683	100
		Jumlah penderita hipertensi di kota	23683	
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6104	100
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	6104	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	102	100
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	102	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2144	100
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2144	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	3181	100

			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	3181	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kota (ha)	3,8	29,69
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	12,8	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kota (ha)	12,48	58,10
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kota (ha)	21,48	
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi & pelihara (ha)	216	90,76

			luas daerah irigrasi kewenangan kota	238	
	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota	53974	100
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota tersebut	53974	
	23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	53913	99,89
			Jumlah rumah di kota	53974	
	24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	148	94,87
			Jumlah IMB yang berlaku	156	
	25	Tingkat Kemantapan Jalan kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	482941	90,24
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota	535175	

		26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis	155	88,57
				Jumlah kebutuhan tenaga operator & teknis/analisis di wilayah kota	175	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	40	100
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	40	
4	PERKIM	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	97	100
				jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	97	
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	167	83,50

			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	200		
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	4,05	14,64	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	27,66		
	31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	10704	19,83	
			Jumlah total unit rumah kota	53974		
	32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	200	0,37	
			Jumlah unit perumahan Kota	53974		
5	TRANTIBUMLINMAS	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	53	100
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	53		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	14	25
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	56	
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	196.474	196474,00 149436,00		

	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	149436	
	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	160	160
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	53	100
			Jumlah kejadian kebakaran di kota	53	

		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,6	8,60
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3	100
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan elandangan pengemis	3	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	1130	100
				populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	1130	

2. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Hasil Evaluasi untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bitung tahun 2020 sedang dalam proses evaluasi oleh Pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Walikota Ir. Maurits Mantiri, MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar, SE bersama Ketua DPRD Aldo N. Ratungalo menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung (LKPD) Tahun Anggaran 2020 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kota Bitung Tahun Anggaran 2020, BPK kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Bitung telah meraih 10 kali Opini WTP secara berturut-turut sejak LKPD Tahun 2011 – 2021.



3. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH (*UNAUDITED*)

Sedangkan jika diuraikan menurut Jenis Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut:

- Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (*UNAUDITED*)

PEMBIAYAAN DAERAH		
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp.70.327.041.355,97
	a. Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.7.747.462.014,97
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.62.500.000.000,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.79.579.341,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp.3.562.000.000,00
	a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.2.619.000.000,00
	b. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.943.000.000,00

5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Penerimaan (*UNAUDITED*)

PENERIMAAN DAERAH		Rp.954.267.783.882,36
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.71.716.802.585,36
	a. Pajak Daerah	Rp.51.201.717.358,35
	b. Retribusi Daerah	Rp.10.333.404.603,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.3.268.125.144,00
	d. Lain-Lain PAD yang Sah	Rp.6.913.555.480,01
2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp.855.504.974.297,00
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.820.722.600.594,00
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.34.782.373.703,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp.27.046.007.000,00
	a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.27.046.007.000,00

- **Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (UNAUDITED)**

BELANJA DAERAH		Rp.808.615.224.356,19
1	BELANJA OPERASI	Rp.651.543.160.490
	a. Belanja Pegawai	Rp.350.763.480.122
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.280.480.329.560
	c. Belanja Bunga	Rp.462.500.000,00
	d. Belanja Hibah	Rp.15.490.050.808
	Belanja Bantuan Sosial	Rp.4.346.800.000
2	BELANJA MODAL	Rp.145.272.457.765,19
	Belanja Modal Tanah	Rp.3.489.900.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.46.088.567.215
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.48.551.241.278
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	Rp.45.387.603.672,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.1.755.145.600
3	BELANJA TIADK TERDUGA	Rp.11.799.606.101
	Belanja Tidak Terduga	Rp.11.799.606.101

5. INOVASI DAERAH TAHUN 2021

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, publik pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan public.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. berikut daftar inovasi daerah di kota Bitung Tahun 2021 :

TABEL
INOVASI DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021

No	PERANGKAT DAERAH	INOVASI
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	MUSRENBANG ANAK
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PEMBEBASAN PBB-P2 BAGI MBR
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KORPRI PEDULI
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	SEKOLAH SUNGAI
6	INSPEKTORAT	UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
7	DINAS KOPERASI DAN UKM	BANGGA BUATAN BITUNG
8	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	CERIA MOBILE
9	DINAS PARIWISATA	FPSL DI MASA PANDEMI
10	DINAS KESEHATAN	PUBLIC SAFETY CENTER 119
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	APLIKASI LAPOR JO
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMBANGUNAN JARINGAN FIBER OPTIK PEMKOT BITUNG
13	DINAS PERHUBUNGAN	PENGATURAN LLAJ
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	KAMPUNG KB
15	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	BEASISWA ANAK BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGURANGAN PENGGUNAAN WADAH PLASTIK
17	DINAS KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN	PEMANFAATAN PEKARANGAN
18	DINAS PERIKANAN	BANTUAN STIMULAN NELAYAN TERDAMPAK COVID-19
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	1.FORUM ANAK
		2.KOTA LAYAK ANAK
20	DINAS SOSIAL	FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN
21	DINAS TENAGA KERJA	TALI KASIH
22	BAGIAN ORGANISASI	APLIKASI SIPIKI
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	INSENTIF HAMBA TUHAN



Tidak dapat dipungkiri dan kita yakini bersama bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan selang Tahun 2021 adalah merupakan hasil sinergi seluruh komponen masyarakat Kota Bitung. Karena itu dengan hati yang tulus kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bitung, baik pimpinan dan anggota DPRD, Jajaran FORKOPIMDA, jajaran birokrasi Pemerintah Kota Bitung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Insan Pers, LSM serta semua pihak yang tidak pernah lelah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk.

Harapan kita bersama bahwa apa yang telah diraih sepanjang tahun 2021 ini dapat membawa dampak positif bagi perjalanan Kota Bitung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di daerah akibat pandemi COVID 19 ini serta menjadi pemicu dan pendorong untuk melakukan yang lebih baik ke depannya.

Diakui bahwa di balik berbagai keberhasilan dan prestasi tersebut, tentunya masih terdapat banyak permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bitung terutama dalam rangka menciptakan masyarakat Kota Bitung yang benar-benar sejahtera lahir dan batin.

Untuk itu kami mengajak seluruh stakeholders yang ada di Kota Bitung untuk tetap bersinergi memberikan kontribusi dan sumbangsih nyata. Marilah kita bersama membangun kota kita, sebab kota ini adalah rumah kita bersama. Rumah yang selalu kita cintai dan kita banggakan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai niat dan usaha kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bitung.



Kota Bitung